



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR :162/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Indonesia dan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 108/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Lanjutan Tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 441/PL.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifkan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 240/PL.04.2-BA/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang Kelanjutan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 Pasca di terbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bima Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

ttd

I M R A N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BIMA
 NOMOR :162/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 BOLO KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BOLO
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

A. DESA TAMBE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RUSLAN	L	DESA TAMBE
2.	DESI NOVITASARI	P	DESA TAMBE
3.	SUHERMANSYAH	L	DESA TAMBE

B. DESA RASABOU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD YAMIN	L	DESA RASABOU
2.	RINI ENDANGSARI	P	DESA RASABOU
3.	ISWAHYUDIN	L	DESA RASABOU

C. DESA RATO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUHERMAN	L	DESA RATO
2.	MUHIDIN, S.Pd	L	DESA RATO
3.	ASTUTI	P	DESA RATO

D. DESA LEU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DEDI PURNAMASARI	L	DESA LEU
2.	MUHLIS	L	DESA LEU
3.	DEWI JAYANTI,S.PD	P	DESA LEU

E. DESA TIMU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RAHMATULLAH	L	DESA TIMU
2.	MUSLIKH	L	DESA TIMU
3.	SYAHRUL	L	DESA TIMU

F. DESA BONTOKAPE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NURRAHMANSYAH	L	DESA BONTOKAPE
2.	MUSLIMIN, S.Pd	L	DESA BONTOKAPE
3.	ASMA'UL HUSNAH	P	DESA BONTOKAPE

G. DESA DARUSALAM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BAYU AKBAR	L	DESA DARUSSALAM
2.	AHMAD	L	DESA DARUSSALAM
3.	IKRAMAN	L	DESA DARUSSALAM

H. DESA SONDOSIA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	JOHARI, ST	L	DESA SONDOSIA
2.	SRI WAHYUNINGSIH	P	DESA SONDOSIA
3.	ZAIDUN, S.Pd	L	DESA SONDOSIA

I. DESA SANOLO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMADI	L	DESA SANOLO
2.	AGUS BUDIMAN, S.Pd	L	DESA SANOLO
3.	EFENDI, S.PD	L	DESA SANOLO

J. DESA KARA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IMRAN	L	DESA KARA
2.	FAHMI, S.Pd	L	DESA KARA
3.	DESI PURNAWATI	P	DESA KARA

K. DESA KANANGA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUHERMAN, S.PD.I	L	DESA KANANGA
2.	SUNARDIN	L	DESA KANANGA
3.	IRWAN, S.Pd	L	DESA KANANGA

L. DESA TUMPU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SYAHBUDIN, A.MA	L	DESA TUMPU
2.	SADAM, SE	L	DESA TUMPU
3.	RANGGA	L	DESA TUMPU

M. DESA RADA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	FATWA	L	DESA RADA
2.	IKHWAN	L	DESA RADA
3.	FATIMAH	P	DESA RADA

N. DESA NGGEMBE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAD	L	DESA NGGEMBE
2.	DARWIS	L	DESA NGGEMBE
3.	NURASYIAH, S.Pd	P	DESA NGGEMBE

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

ttd

I M R A N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
Kasubag Hukum,

